

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
RENCANA KERJA



RENJA

TANJUNG REDEB, MARET 2019

T
A
H
U
N

2
0
1
9

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau (BPBD) Tahun 2020 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2020 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun ke-4 dengan tetap sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2016-2021 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Anggaran 2020. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan



perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2019 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat serta mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju Kabupaten Berau Mandiri.

Tanjung Redeb,

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN BERAU**

**H. THAMRIN, S.Sos
Pembina TK.I
NIP. 19630818 199009 1 001**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Penyusunan	2
3. Struktur Organisasi	3
4. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	4
5. Tugas Pokok dan Fungsi	10
BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2018	13
1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	13
2. Evaluasi Kinerja Kebijakan	18
3. Permasalahan Dan Rekomendasi.....	19
BAB III KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN	21
1. Maksud dan Tujuan	21
2. Sasaran	22
3. Program dan Kegiatan	23
BAB IV INDIKATOR KINERJA	28
Indikator Kinerja	28
BAB V DANA INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN	34
BAB VI PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Bencana terbagi oleh bermacam jenis, antara lain seperti bencana kebakaran, banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, longsor, puting beliung dll.

Kabupaten Berau yang jumlah penduduknya terus bertambah pesat seiring terus berkembangnya pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa tentu akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk sehingga ruang terbuka hijau akan semakin kecil, lahan pertanian akan berkurang, penataan perkotaan yang kurang baik, drainase yang tidak terpelihara dengan baik, sehingga kemungkinan bencana banjir akan terjadi dan potensi kebakaran diperkotaan semakin besar. Ditambah dengan kondisi wilayah Kecamatan pesisir (Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Maratua, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Biduk-biduk) yang landai antara daratan dan pantai, sehingga kemungkinan banjir rob air laut akan terjadi sangat potensi sekali.

Sejalan dengan kondisi alam dan cepatnya pertumbuhan dan perkembangan perkotaan maka terlahir kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau dengan Peraturan Daerah Berau Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, yang menjadi dasar terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau

Dengan telah terbitnya peraturan daerah Tersebut, maka apabila terjadi bencana secara tupoksi terdapat institusi/lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, walaupun sesungguhnya masalah bencana tidak mutlak urusan Pemerintah saja namun urusan kita semua.

2. DASAR PENYUSUNAN

Dasar penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Berau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau

5. Peraturan Bupati Berau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.

3. STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Dasar hukum pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun susunan struktur organisasi terdiri sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretaris, membawahi :
 - Kasubbag Perencanaan Program
 - Kasubbag Keuangan dan Asset
 - Kasubabag Umum dan kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - Seksi Pencegahan
 - Seksi Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - Seksi Penanganan Darurat
 - Seksi Logistik dan Peralatan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, membawahi :
 - Seksi Rehabilitasi
 - Seksi Rekonstruksi

4. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

A. Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau hanya didukung dengan keberadaan PNS dan Non PNS sejumlah 85 (Delapan Puluh Lima) orang terdiri dari 80 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I
Kondisi Kepegawian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	43
2	Non PNS	42
JUMLAH		85

Jumlah personil sebagaimana tersebut diatas sangatlah kurang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik untuk kebutuhan kesekretariatan maupun untuk teknis di tiap-tiap Kepala Seksi untuk tugas lapangan, berdasarkan analisa kebutuhan jumlah personil di BPBD Kabupaten Berau idealnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang atau dengan pola minimal sebanyak 100 (seratus) orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan, kombinasi tingkat pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 1	3
2	Strata 2	26
3	Strata 3	0
4	Diploma II	2
5	Diploma IV	1
6	SLTA	44
7	SMP	2
8	SD	7
JUMLAH		85

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau namun dari segi kualitas sumber daya manusia baik PNS/Tenaga Kontrak sangat kurang. Tingkat kekurangan jumlah pegawai dirasakan terutama untuk tenaga administrasi setiap bidang dan tenaga di lapangan dan belum keseluruhan tenaga di lapangan, ataupun teknis yang mengikuti diklat teknis/substantif, diklat struktural maupun fungsional.

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel. 3
Daftar Pangkat dan Golongan Pegawai BPBD Kabupaten Berau
Tahun 2018

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Juru Muda / I a	1
2	Juru Muda Tingkat I / I b	5
3	Juru / I c	2
4	Juru Tingkat I / I d	
5	Pengatur Muda / II a	2
6	Pengatur Muda Tingkat I / II b	
7	Pengatur / II c	15
8	Pengatur Tingkat I / II d	
9	Penata Muda / III a	2
10	Penata Muda Tingkat I / III b	
11	Penata / III c	3
12	Penata Tingkat I / III d	8
13	Pembina / IV a	4
14	Pembina TK I / IV b	1
15	Pembina Utama Muda / IV c	
16	Pembina Utama Madya / IV d	
17	Pembina Utama / IV e	

Sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, tercatat 69,76% pegawai BPBD Kabupaten Berau adalah golongan III dan II, yang merupakan pegawai berpendidikan Strata 1 dan SLTA. Pegawai yang berpendidikan Strata 1 pada umumnya sudah menduduki

pangkat puncak pada jenjang kepegangannya dan telah sebagian besar telah memiliki masa kerja kurang lebih 15 sampai dengan 20 tahun.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Daftar Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional BPBD Kabupaten Berau Tahun 2018

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Pejabat Struktural	13
2	Pejabat Fungsional	0
3	Staf/pelaksana PNS	30
4	Staf/pelaksana PTT	42

Berdasarkan tingkat kepangkatan, pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Tingkat Kepangkatan/Golongan

NO	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	13
3	Golongan II	17
4	Golongan I	8
5	PTT/Tenaga kontrak	42
JUMLAH		85

B. Keadaan Perlengkapan

Sebagai unit kerja yang mengemban tugas dibidang penanggulangan bencana tentunya sangat banyak bersentuhan dengan masyarakat, sarana dan prasarana dalam menunjang operasioanal dilapangan manjadi sangat penting mendapatkan perhatian, karena keterbatasan sarana dan prasarana akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau masih menggunakan eks Dinas Kehutanan Kabupaten Berau artinya belum punya gedung sendiri dan daya dukung sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kantor belum cukup untuk memaksimalkan daya kerja dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana seperti, personil, kendaraan opsional, sarana kesiapsiagaan, sarana rehabilitasi dan rekontruksi sarana kedaruratan dan logistic serta peralatan penunjang lainnya, kondisi ini perlu mendapat perhatian dan dilengkapi guna membangun pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.

Tabel 6
Kondisi Perlengkapan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sarana dan Prasarana

NO	JENIS / NAMA BARANG	JUMLAH
1	Komputer PC	6 Unit
2	Note book/Laptop	8 Unit
3	Printer	15 Unit
4	Motor / kendaraan roda dua	5 Unit
5	Kendaraan Roda 4	7 Unit
6	Mobil Damkar	14 Unit
7	Mobil Water Supply	12 Unit
8	Mobil Dalmas	1 Unit
9	Motor roda 3	2 Unit
10	AC Split	15 Unit
11	Televisi	4 Buah
12	Kursi	58 Buah
13	Meja	42 Buah
14	Pulse generator	1 Unit
15	Mesin kompresor	3 Unit
16	Mesin gergajih	2 Unit
17	Portable water pump	5 Unit
18	Papan Pengumuman	2 Buah
19	Lemari arsip	16 Buah
20	Brankas	1 Buah
21	Dongkrak hidrolik	2 Unit
22	Alat pemadam kebakaran	10 Unit

23	Perahu Karet/evakuasi	5 Unit
24	Infocus/Proyektor	1 Paket
25	Camera/handycam	3 buah
26	Sound Sytem	1 Paket
27	Tandu Lipat	10 Unit
28	Tenda	6 Unit
29	Radio Komunikasi	10 Unit

Dari data inventaris sarana dan prasarana kerja diatas kurang memadai untuk cakupan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.

5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau mempunyai tugas

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan;
- j. Melaksanakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat , efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Visi dan Misi

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dirumuskan dengan menyimak beberapa dasar pemikiran, antara lain sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kondisi dan kebutuhan riil saat ini;
3. Point of interest Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Kondisi eksternal;
5. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan pemikiran diatas maka Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2016 – 2021 dirumuskan sebagai berikut :

“BPBD Yang kuat, Mampu, utuh dan tangguh dalam Penanggulangan Bencana “

Makna yang terkandung dalam pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021 diatas, merupakan bentuk komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Pembangunan Daerah.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi yang dirumuskan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terjadinya bencana
2. Cepat Merespon saat terjadinya bencana dan
3. Sigap memulihkan situasi pasca terjadinya bencana.

BAB II

EVALUASI KINERJA TAHUN 2018

1. EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sehubungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang baru berdiri akhir tahun 2014 akan tetapi akan kami paparkan Program dan Kegiatan untuk tahun 2019.

Sebagaimana program dan kegiatan yang tercantum pada rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau tahun 2018 yang terdiri dari 6 Program dan 43 kegiatan, dengan indikator kinerja sebagai berikut.

Dari penyusunan program kerja yang tersusun secara terencana dan menyeluruh dengan berpedoman kepada peraturan Bupati sebagaimana dimaksud diatas tentu adanya implementasi yang baik dan signifikan dilapangan sebagaimana tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebagai pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Adapun kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung pada masyarakat adalah kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembekalan kepada aparatur dilapangan dan masyarakat khususnya tentang informasi, potensi bencana alam, yang dikemas dalam bentuk sosialisasi peningkatan pelayanan public dalam bidang penanggulangan bencana.

2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang masalah kebakaran pemukiman dan Peraturan Daerah mengenai manajemen kebakaran pemukiman dan gedung bertingkat di 13 (tiga belas) Kecamatan terdekat .
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sebanyak 100 (Seratus) orang mengenai penanggulangan bencana.

2. EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN

Sudah kita maklumi dan ketahui bersama bahwa Kabupaten Berau yang merupakan daerah yang memiliki posisi yang cukup strategis dalam segala hal terutama dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya khususnya pengembangan aparatur Pemerintah Daerah dan sumber daya manusia (SDM). Kabupaten Berau dengan luas wilayah 34.127,47 Km² yang dibagi terdiri dari 13 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 97 Kampung dengan jumlah penduduk sebanyak 251.343 jiwa dengan komunitas yang cukup heterogen dari aspek social, kultur, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan cara yang arif dan bijaksana serta satu pemahaman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga tidak terjadi miss komunikasi / kesalah fahaman di lapangan. Dalam kondisi yang demikian itu tentu diperlukan petugas dan atau relawan yang professional, mengerti dan bijak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Permasalahan

Sebagaimana dimaklumi bahwa sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana, bahwa BPBD mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, oleh sebab itu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau memerlukan tenaga-tenaga yang cukup handal, baik kuantitas maupun kualitasnya. Namun kenyataannya sampai saat ini jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sangat tidak seimbang apabila dibandingkan dengan beban tugasnya yang berjumlah dengan PNS sebanyak 85 orang (43 orang PNS sekretariat dan 42 orang non PNS)

Selain itu realisasi fisik keuangan sangat kecil karena kegiatan DBH DR DPPA di sah kan akhir bulan juli 2018, namun tidak menghambat berjalannya seluruh program dan kegiatan anggaran murni tahun 2018 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dengan presentase 90,95% sedangkan untuk DBH DR presentasenya sebesar 9,18 dari total anggaran keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sebesar Rp. 139.128.013,349 yang teralisasi sebesar Rp. 20.700.342.246 dengan presentase 14,87%. maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

- a. Sarana Gedung/bangunan kantor belum refresntatif
- b. Kurangnya sumber daya manusia khususnya PNS

- c. Ketersediaan sarana komputer masih kurang
- d. Inovasi Layanan masih belum maksimal
- e. Pagu anggaran yang masih sangat minim setiap tahunnya
- f. Penyebaran Informasi yang masih kurang

Rekomendasi

Dengan kondisi beban tugas yang cukup berat dan jumlah personil yang sedikit sangat tidak seimbang dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, sudah waktunya Pemerintah Daerah Kabupaten Berau memikirkan serta memperkuat lembaga ini dengan mencukupi SDM/personil baik untuk kebutuhan sekretariat maupun lapangan dengan status berstatus pegawai negeri sipil sehingga ada keseimbangan antara beban tugas dan sumber daya manusia.

Agar SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Berau menjadi pegawai yang handal dan terampil perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat teknis Penanggulangan Bencana

Terpenuhi sarana dan prasarana berupa gedung/Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Agar himbuan kepada masyarakat lebih berinovasi di Kabupaten Berau perlu dilakukan himbuan atau sosialisasi melalui pameran, media sosial, whatapps, brosur, baliho dan lain-lain untuk itu diperlukan dukungan anggaran yang memadai.

BAB III

KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN

a. M A K S U D

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai landasan pembangunan tahunan Kabupaten Berau. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang ditindaklanjuti dengan terbitnya regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yaitu Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau, dimana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi ; prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

b. T U J U A N

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelayanan penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara professional
3. Meningkatkan mutu pelayanan petugas dan relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu.
4. Adanya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

2. SASARAN

Adapun sasaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau tahun 2019 adalah sumber daya manusia (perangkat) yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau terutama para pejabat struktural yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Bupati nomor 5 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau. Para pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau mampu menjabarkan tugas dan fungsinya serta melaksanakannya secara profesional dilapangan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai serta anggota/pelaksana yang handal dan trampil.

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau tahun anggaran 2019 berdasarkan perencanaan awal terdiri dari 6 program dan 49 kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
I	1.05.1.05.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	1.05.1.05.2.01.01	-	Penyediaan jasa surat menyurat
2	1.05.1.05.2.01.02	-	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3	1.05.1.05.2.01.06	-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4	1.05.1.05.2.01.07	-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5	1.05.1.05.2.01.08	-	Penyediaan jasa kebersihan kantor
6	1.05.1.05.2.01.09	-	Penyediaan jasa perbaikan kantor
7	1.05.1.05.2.01.10	-	Penyediaan alat tulis kantor
8	1.05.1.05.2.01.11	-	Penyediaan barang cetak dan penggandaan
9	1.05.1.05.2.01.12	-	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
11	1.05.1.05.2.01.13	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12	1.05.1.05.2.01.14	-	Penyediaan peralatan rumah tangga

13	1.05.1.05.2.01.15	-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
14	1.05.1.05.2.01.17	-	Penyediaan makanan dan minuman
15	1.05.1.05.2.01.18	-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
16	1.05.1.05.2.01.19	-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
17	1.05.1.05.2.01.20	-	Penyediaan jasa administrasi / tekhnis perkantoran
II	1.05.1.05.2.02.04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	1.05.1.05.2.02	-	Pengadaan Mobil Jabatan
III	1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	1.05.1.05.02.06.09	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
2	1.05.1.05.02.06.09	-	Penyusunan Renstra, LAKIP, SOP, IKM, Lap. Evaluasi
3	1.05.1.05.02.06.09	-	Sosialisasi Kinerja SKPD
IV	1.04.1.05.02.18	Program Peningkatan Perumahan akibat bencana alam/social	
1	1.04.1.05.02.18.03	-	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1	2	3	4
V	1.04.1.05.02.19	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	

1	1.04.1.05.02.19.02	-	Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
2	1.04.1.05.02.19.12	-	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran
VI	1.05 1.05.02.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam	
1	1.05 1.05.02.22.01	-	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam
2	1.05 1.05.02.22.06	-	Tanggap Darurat Operasional Penanggulangan Bencana
3	1.05 1.05.02.22.07	-	Pelatihan Penanggulangan Bencana
4	1.05 1.05.02.22.10	-	Penyusunan Pemetaan Rawan Bencana
5	1.05 1.05.02.22.11	-	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kesiapsiagaan
		Pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan	
1	1.05 1.05.02.23.2		Pembuatan Ilaran Api (DBH DR)
2	1.05 1.05.02.23.3		Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBH-DR)
3	1.05 1.05.02.23.9		Pelatihan/Pembekalan/inhouse training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
4	1.05 1.05.02.23.10		Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

5	1.05 1.05.02.23.11		Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Karhutla Melalui Berbagai Ragam Metode (DBH-DR)
6	1.05 1.05.02.23.12		Pembuatan Bahan Kampanye dan atau Alat Peraga Pencegahan Karhutla (DBH-DR)
7	1.05 1.05.02.23.13		Simulasi Mobilisasi Berbagai Tindakan (DBH-DR)
8	1.05 1.05.02.23.14		Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-lain (DBH-DR)
9	1.05 1.05.02.23.15		Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan (DBH-DR)
10	1.05 1.05.02.23.16		Pembuatan Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Karhutla (DBH-DR)
11	1.05 1.05.02.23.17		Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
12	1.05 1.05.02.23.18		Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
13	1.05 1.05.02.23.19		Pendirian Posko Lapangan (DBH-DR)
14	1.05 1.05.02.23.20		Pemadaman Langsung (DBH-DR)
15	1.05 1.05.02.23.21		Analisa Vegetasi Bekas Terbakar (DBH-DR)
16	1.05 1.05.02.23.22		Monitoring dan Menindaklanjuti Segala Hal Terkait Pelaksanaan Penanganan Proses Penegakan Hukum Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

17	1.05 1.05.02.23.23		Kampanye Pencegahan Karhutla dalam rangka Penyedartahuan Pencegahan Karhutla (DBH-DR)
18	1.05 1.05.02.23.24		Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
19	1.05 1.05.02.23.26		Penerapan Agroforestry, Agro Silva Pastura, Silva Pastura dan Kegiatan Selanjutnya (DBH-DR)
20	1.05 1.05.02.23.27		Pembuatan Rancangan Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

1. INDIKATOR KINERJA

Pertumbuhan penduduk dalam suatu daerah akan berdampak pada perubahan daerah itu sendiri dalam berbagai bidang/sector, seperti laju pertumbuhan perdagangan dan jasa cepat berkembang, tumbuhnya sector pendidikan formal dan non formal, disamping adanya dampak positif sebagaimana tersebut diatas bisa jadi perubahan status kota akan timbul dampak negative seperti tidak/kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, runtuhnya fisosofi gotong royong yang sudah berakar ditanah tercinta Indonesia.

Dalam kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi penyelenggara pemerintahan khususnya bidang penanggulangan Bencana, karena perubahan perkotaan yang tidak diimbangi dengan perubahan penataan perkotaan (penataan ruang wilayah yang baik, penataan drainase yang baik, mental masyarakat yang tidak berwawasan lingkungan) akan lebih mendekatkan bencana pada kota itu sendiri.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dengan segala keterbatasannya terus melangkah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016

Adapun indikator kinerja program dan kegiatan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PENCAPAIAN SASARAN	TARGET
1	2	3	4
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan lancar	500 lembar
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan penerangan gedung kantor	12 Bulan
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	23 unit
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dengan lancar	16 Orang
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	1000 M ²
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kantor	25 %
7	Penyediaan alat tulis kantor	Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran	20 Jenis
8	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran	15.000 Lembar

9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	4 gedung
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat dan perlengkapan kantor	1 jenis
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga kantor	7 ruang
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 jenis majalah
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kantor	1000 orang
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 ot
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80 ot
16	Penyediaan jasa administrasi / tehnis perkantoran	Terpenuhinya kegiatan administrasi perkantoran	5 orang
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen	5 Dokumen
III	Program Peningkatan Perumahan akibat bencana alam/social		

1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	7 Kecamatan
IV	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		
1	Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	5 Kali
2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran	Terlaksananya pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran	100%
V	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam		
1	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Adanya pemahaman masyarakat tentang potensi bencana	13 Kecamatan
2	Tanggap Darurat Operasional Penanggulangan Bencana	Tersedianya anggaran pada saat terjadi bencana	100%
	Pelatihan Penanggulangan Bencana		
	Penyusunan Pemetaan Daerah Rawan Bencana		1 Dokumen
VI	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan		

	Lahan		
1	1.05 1.05.02.23.2	Pembuatan Ilaran Api (DBH-DR)	-
2	1.05 1.05.02.23.3	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBH-DR)	-
3	1.05 1.05.02.23.9	Pelatihan/Pembekalan/inhouse training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	165 orang
4	1.05 1.05.02.23.10	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	-
5	1.05 1.05.02.23.11	Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Karhutla Melalui Berbagai Ragam Metode (DBH-DR)	1,00
6	1.05 1.05.02.23.12	Pembuatan Bahan Kampanye dan atau Alat Peraga Pencegahan Karhutla (DBH-DR)	-
7	1.05 1.05.02.23.13	Simulasi Mobilisasi Berbagai Tindakan (DBH-DR)	-
8	1.05 1.05.02.23.14	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-lain (DBH-DR)	8 Kali
9	1.05 1.05.02.23.15	Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan (DBH-DR)	-
10	1.05 1.05.02.23.16	Pembuatan Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Karhutla (DBH-DR)	-
11	1.05 1.05.02.23.17	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	-

12	1.05 1.05.02.23.18	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	1 Posko
13	1.05 1.05.02.23.19	Pendirian Posko Lapangan (DBH-DR)	-
14	1.05 1.05.02.23.20	Pemadaman Langsung (DBH-DR)	100%
15	1.05 1.05.02.23.21	Analisa Vegetasi Bekas Terbakar (DBH-DR)	1 dokumen
16	1.05 1.05.02.23.22	Monitoring dan Menindaklanjuti Segala Hal Terkait Pelaksanaan Penanganan Proses Penegakan Hukum Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	1 dokumen
17	1.05 1.05.02.23.23	Kampanye Pencegahan Karhutla dalam rangka Penyedartahuan Pencegahan Karhutla (DBH-DR)	-
18	1.05 1.05.02.23.24	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	368 unit/luas
19	1.05 1.05.02.23.26	Penerapan Agroforestry, Agro Silva Pastura, Silva Pastura dan Kegiatan Selanjutnya (DBH-DR)	-
20	1.05 1.05.02.23.27	Pembuatan Rancangan Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	-

BAB V

DANA INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN

B I A Y A

Biaya / anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau bersumber dari APBD Kabupaten Berau Tahun 2019 , yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.

Adapun rencana pagu indikatif untuk program dan kegiatan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
		APBD KAB	JUMLAH
1	2	3	4
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.407.900.000	1.407.900.000
1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000
1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	165.000.000	165.000.000
1.05.1.05.02.01.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	500.000.000	500.000.000
1.05.1.05.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	110.340.000	110.340.000
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000	10.000.000
1.05.1.05.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan kantor	20.160.000	20.160.000
1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan alat tulis	15.000.000	15.000.000

	kantor		
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	13.500.000	13.500.000
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000
1.05.1.05.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.000.000	9.000.000
1.05.1.05.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.000.000	6.000.000
1.05.1.05.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	4.000.000	4.000.000
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000	75.000.000
1.05.1.05.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000	150.000.000
1.05.1.05.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.000.000	100.000.000
1.05.1.05.02.01.20	Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran	220.900.000	220.900.000
1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.000.000	22.000.000
1.05.1.05.02.06.09	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	22.000.000	22.000.000
1.05.1.05.02.06.11	Sosialisasi Kinerja SKPD	00	00
1.04.1.05.02.18	Program Peningkatan Perumahan akibat bencana alam/social	77.000.000	77.000.000

1.04.1.05.02.18.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	77.000.000	77.000.000
1.04.1.05.02.19	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.326.600.000	1.326.600.000
1.04.1.05.02.19.02	Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	100.000.000	100.000.000
1.04.1.05.02.19.12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran	1.226.600.000	1.226.600.000
1.05 1.05.02.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam	685.000.000	685.000.000
1.05 1.05.02.22.01	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam	100.000.000	100.000.000
1.05 1.05.02.22.06	Tanggap Darurat Operasional Penaggulangan Bencana	335.000.000	335.000.000
1.05 1.05.02.22.07	Pelatihan Penanggulangan Bencana	150.000.000	150.000.000
1.05 1.05.02.22.10	Penyusunan Pemetaan Daerah Rawan Bencana	100.000.000	100.000.000

BAB VI

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 ini kami buat sebagai pedoman / acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan tersusunnya rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau tahun 2019 diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat dikerjakan menjadi lebih terarah dan sistimatis.

Kami sadar bahwa rencana kerja (renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019 ini jauh dari sempurna, namun inilah yang dapat kami susun sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penyelenggara penanggulangan bencana. Dan selanjutnya kami mohon saran dan pendapat dari semua pihak sehingga kami dapat memperbaiki baik dari segi pembuatan atau penyusunan renja maupun rencana kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019.

Tanjung Redeb, Januari 2019

KEPALA PELAKSANA

H. THAMRIN, S.Sos
NIP. 19630818 199009 1 001